

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penghindaran pajak terjadi tidak lepas dari perencanaan manajemen perusahaan dan undang-undang yang masih memiliki celah untuk diselewengkan. Terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi pajak. Di sisi lain, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal.

**Tabel 1.1 Penerimaan Dalam Negeri dari Perpajakan Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Penghasilan dari Pajak (Milyar Rupiah)</b>			
	<b>Realisasi</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Selisih</b>	<b>(% selisih)</b>
2012	980.518	1.016.237	35.719	3,51%
2013	1.077.307	1.148.365	71.058	6,19%
2014	1.146.866	1.246.107	99.241	7,96%
2015	1.240.419	1.489.256	248.837	16,71%
2016	1.539.166	1.546.665	7.498	0,48%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2012-2017

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik penerimaan dalam negeri yang bersumber dari yang bersumber dari perpajakan dari tahun 2012-2016 (Tabel 1.1) menunjukkan realisasi penerimaan dari pajak atas anggaran masih belum dapat teratasi. Tahun 2012-2015 data menunjukkan selisih atas realiasi dan anggaran semakin besar. Realisasi dari pajak menunjukkan realisasi pada rentan waktu tersebut semakin menurun. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan dari pajak

sangat menurun dari 7,96% menjadi 16,71%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2015 penerimaan dari pajak tidak dapat direalisasi salah satunya adalah adanya indikasi pelaku ekonomi di Indonesia melakukan penghindaran pajak.

Menurut (Zain, 2003), *tax planning* adalah usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak meminimumkan utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut perencanaan pajak (*tax planning*) yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Winata, 2014).

Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah Kinerja keuangan dan *corporate governance*. *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator dari kinerja keuangan yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil

bahwa *ROA* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah yang negatif. Cahyono *et al.* (2016) menemukan tidak adanya hubungan antara *ROA* dan *tax avoidance*.

Selain *ROA*, Kinerja Keuangan suatu perusahaan juga dapat diukur menggunakan Rasio *leverage*. *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Penelitian terkait dengan *leverage* dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) yang menjelaskan bahwa *leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ngadiman dan Puspitasari (2014) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

*Dividend Payout Ratio (DPR)*, juga merupakan indikator dari Kinerja Keuangan Perusahaan. *Dividend payout ratio* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.. Laba perusahaan menjadi pertimbangan penentuan dividen per lembar sehingga laba perusahaan menjadi tolak ukur dalam kinerja keuangan suatu perusahaan (Utomo *et al.*, 2016). Laba yang optimal menggambarkan kinerja perusahaan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan berusaha agar laba selalu optimal. Pembayaran dividen yang rendah berindikasi bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak optimal sehingga perusahaan perusahaan akan mencari cara agar kinerja keuangan perusahaan menjadi optimal dan meningkatkan pembayaran dividennya yang kemudian akan menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Tetapi, di sisi lain perusahaan yang

pembayaran dividennya terlalu tinggi menjadi sinyal negatif bahwa perusahaan tersebut tidak berprospek di masa depan (Novianti, 2015).

*Corporate Governance* (CG) menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tatakelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Kurniasih dan Sari (2013) mengemukakan bahwa Komposisi komisaris independen dan Keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Winata (2014), *corporate governance* secara simultan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Penelitian ini sangat penting berdasarkan tabel 1.1 di atas, indikasi penghindaran pajak masih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dilihat dari realisasi anggaran pada penghasilan dari pajak semakin menurun. Penghindaran pajak dilakukan baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Namun pada penelitian ini hanya fokus pada penghindaran pajak secara legal karena kedepannya akan sangat merugikan pemerintah dalam mencapai kinerja yang baik pada realisasi anggaran pendapatan negara maupun daerah. Penghindaran pajak masih terjadi disebabkan masih adanya peraturan mengenai *self assesment system* yang memungkinkan pengusaha kena pajak untuk menghitung pajaknya sendiri.

Kurniasih dan Sari (2013) dan Cahyono *et al.* (2016) yang meneliti kinerja keuangan terhadap *tax avoidance* hanya menggunakan *ROA* dan *Leverage* sebagai pengukurannya. Sehingga, pada penelitian ini akan ditambahkan *Dividend Payout Ratio* dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan pada *corporate governance*, penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.* (2016),

Ngadiman dan Puspitasari (2014), dan Sari (2014) hanya menggunakan dua sampai tiga proksi dari *corporate governance*. *Corporate governance* memiliki sembilan indikator. Tiga indikator pada penelitian terdahulu belum mewakili *corporate governance* secara keseluruhan dari sembilan indikator. Penelitian ini menggunakan lima indikator dari sembilan indikator karena sudah mencakup lebih dari 50% indikator *corporate governance*. Penelitian ini menggunakan lima proksi *corporate governance* yaitu, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian apakah kinerja keuangan yang diukur menjadi *return on assets*, *leverage*, dan *dividend payout ratio* serta *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* periode 2016. Pemilihan JII sebagai objek penelitian karena berkaitan saham yang diterbitkan dengan kriteria syariah. JII dibentuk untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk menginvestasikan dana mereka pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi investor dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas, salah satunya dengan melaporkan rincian pajak perusahaan. Dengan rincian tersebut, dapat dilihat apakah perusahaan yang terdaftar dalam JII dan menerbitkan saham syariah terdapat indikasi untuk melakukan penghindaran pajak atau tidak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang diperoleh maka penulis merumuskan masalah:

1. Apakah *Kinerja Keuangan* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh *Kinerja Keuangan* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Menguji secara empiris pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *Kinerja Keuangan* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sekaligus tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII).
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan pemerintah dalam meningkatkan realisasi anggaran salah satunya dari menurunkan tingkat penghindaran pajak pada pelaku ekonomi di Indonesia.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide bagi peneliti-peneliti selanjutnya guna melanjutkan dan mengembangkan penelitian.